



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)
UNIT KERJA : LOKA POM TANJUNGBALAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DENNY SABARTA PURBA
2. Jabatan : KEPALA LOKA
3. NHK : 463153

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.625.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 317 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , WARISAN Rp. 2.225.000.000
2. Tanah Seluas 210 m2 di KAB / KOTA KARO, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
3. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 245.000.000

1. MOTOR, YAMAHA BT3 M/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
2. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5 S M/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 68.925.494

F. HARTA LAINNYA Rp. 112.000.000

Sub Total Rp. 3.050.925.494

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.050.925.494

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.